

# DAMPAK PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB) TERHADAP PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT DI SEKITAR KERTAJATI KAB MAJALENGKA

Imma Ismaniar<sup>1</sup>  
Asnita Frida Sebayang<sup>2</sup>

## Abstrak

Paper ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembebasan lahan yang diakibatkan oleh pembangunan BIJB terhadap produktivitas lahan pertanian masyarakat di sekitar Kertajati Kabupaten Majalengka. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) merupakan realisasi rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat yang kemudian dijadikan pembangunan nasional. Pembangunan BIJB membutuhkan dukungan dari masyarakat khususnya dukungan berkaitan dengan pembebasan lahan yang akan dijadikan area bandara. Lahan tersebut pada umumnya merupakan lahan pertanian. Persoalannya, apakah dampak pembebasan tanah tersebut terhadap produktivitas pertanian di Majalengka? Apakah membawa dampak positif atau negative? Paper ini berupaya untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Berdasarkan hasil survey lapangan dan uji statistik diperoleh bahwa pembebasan lahan justru meningkatkan produktivitas lahan pertanian milik masyarakat yang terkena pembebasan. Hal ini karena sebagian besar hasil penjualan tanah digunakan untuk membeli tanah yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Bandara Internasional Jawa Barat, Pembebasan Lahan, Produktivitas Lahan Pertanian

---

<sup>1</sup> Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unisba

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Unisba

## PENDAHULUAN

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka merupakan salah satu bentuk realisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan wilayah Metropolitan Cirebon Raya (MCR). MCR merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pengembangan wilayah di daerah, khususnya di Jawa Barat Bagian Timur. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Sementara itu, peraturan Pembangunan BIJB sendiri pun tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019. Keputusan Menteri tersebut menyebutkan bahwa pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) merupakan tanggungjawab Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun BIJB ini adalah seluas 1.800 ha yang meliputi 6 (enam) desa, yaitu Desa Kertajati, Desa Kertasari, Desa Bantarjati, Desa Sukamulya, Desa Babakan, dan Desa Sukakerta, yang keseluruhannya terletak di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Pembangunan BIJB ini memerlukan dukungan dari masyarakat setempat, salah satunya dengan pembebasan lahan. Pembebasan lahan tersebut dilakukan dibawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Petikan wawancara dengan UMP BIJB, 2015). Sampai dengan Desember 2015, baru empat desa yang terkena proses pengadaan tanah, yaitu Desa Kertasari, Desa Bantarjati, Desa Sukakerta dan Desa Kertajati (Petikan wawancara dengan UMP BIJB, 2015). Pembangunan bandara ini sebagian besar berada di lahan sawah. Hal ini dapat dilihat pada peta yang berasal dari google earth bahwa lokasi yang ditunjukkan oleh panah untuk BIJB ini terdapat pada bentuk yang berupa petak-petak dan berwarna hijau. Sawah adalah penggunaan lahan dengan vegetasi dominan tanaman padi. Lahan sawah dalam *google earth* memiliki bentuk yang teratur dan berupa petak-petak sawah (Agustina, 2010). Persoalannya, apakah dengan adanya pembebasan lahan yang didominasi lahan sawah di sekitar Kertajati ini berdampak pada produktivitas lahan pertanian masyarakat Kertajati? Jika iya, apakah dampak yang muncul dengan adanya pembebasan lahan tersebut? Untuk menjawab persoalan-persoalan ini, paper ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembebasan lahan yang diakibatkan oleh pembangunan BIJB terhadap produktivitas lahan pertanian masyarakat di sekitar Kertajati Kabupaten Majalengka. Berdasarkan tujuan tersebut, pembahasan dalam paper ini terbagi kepada lima bagian. Pertama, pembahasan terkait metodologi penelitian; kedua, konsep pembebasan lahan; ketiga, gambaran umum bandara Internasional Jawa Barat; keempat, dampak pembebasan lahan terhadap produktivitas padi masyarakat di sekitar Kertajati; kelima, kesimpulan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan tujuan paper ini yaitu untuk menganalisis dampak pembebasan tanah yang diakibatkan oleh pembangunan BIJB terhadap produktivitas lahan pertanian masyarakat di sekitar Kertajati Kabupaten Majalengka. Metode penelitian dalam paper ini menggunakan pendekatan *mix method* yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan penyebaran kuisioner pada masyarakat terkena pembebasan tanah. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 1 Desember 2015 hingga 15 Februari 2016. Teknik pengumpulan sampel dilakukan menggunakan pendekatan *random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 99 sampel. Sebaran sampel dilakukan di Desa Bantarjati, Desa Kertajati, Desa Kertasari dan Desa Sukakerta. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode analisis data yaitu Statistika Uji Beda Rata-rata: *Paired Samples T Test* (Uji Sampel Berpasangan), Uji Statistika Non Parametrik: Uji Dua Sampel Berhubungan dan Skala Likert.

## TINGKAT PRODUKTIVITAS PADI

Keberhasilan pembangunan pertanian dapat menggunakan indikator tingkat kesejahteraan hidup rakyat. Kesejahteraan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah tanggungan keluarga, pendapatan keluarga, umur, tabungan, beban hutang keluarga, dan lokasi tempat tinggal (Hanjani, 2012). Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan menggunakan 4 parameter, yaitu produktivitas, stabilitas, Sustainability, dan Equitabilitas. Namun dalam perencanaan pengembangan wilayah dapat menggunakan 2 parameter yaitu produktivitas dan stabilitas (Taufik, 2012). Produktivitas adalah kemampuan suatu faktor produksi, seperti luas tanah, untuk memperoleh hasil produksi per hektar. Produksi dan produktivitas ditentukan oleh banyak faktor seperti kesuburan tanah, varietas bibit yang ditanam, penggunaan pupuk yang memadai baik jenis maupun dosis, tersedianya air dalam jumlah yang cukup, teknik bercocok tanam yang tepat dan penggunaan alat-alat produksi pertanian yang memadai dan tersedianya tenaga kerja (Partadiredja, 1980) dalam (Aminuddin, 2009). Ketersediaan sumber daya lahan, air dan iklim merupakan dasar

utama untuk menghasilkan produksi pangan secara optimal. Pemahaman karakteristik sumber daya lahan, air dan iklim merupakan kunci utama keberhasilan dalam produksi tanaman. Karakteristik yang perlu diketahui berupa kesuburan baik fisik, kimia dan biologis, aerasi, ketahanan terhadap erosi (Taufik, 2012).

## PEMBEBASAN LAHAN

Lahan adalah tanah pertanian atau tanah untuk perumahan, atau dengan kata lain lahan adalah tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemilikinya (perorangan atau lembaga) (Jayadinata, 1999). Pengertian lain tentang lahan yaitu salah satu sumberdaya alam yang sangat penting bagi manusia, mengingat kebutuhan masyarakat baik untuk melangsungkan kehidupannya maupun untuk kebutuhan kegiatan kehidupan sosial, ekonomi dan sosial-budaya. Lahan termasuk jenis sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui karena keberadaannya sebagai keadaan yang berharga (Ritohardoyo, 2013). Penggunaan lahan adalah interaksi manusia dan lingkungannya, dimana fokus lingkungan adalah lahan, sedangkan sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan langkah-langkah aktivitasnya, aktivitas tersebut adalah kegiatan manusia di permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ritohardoyo, 2013). Utomo (1992) dalam Munir (2008), menjelaskan bahwa secara garis besar penggunaan lahan dapat digolongkan menjadi dua, yakni :

- 1) Penggunaan lahan dalam kaitan dengan pemanfaatan potensi alamnya, seperti kesuburan, kandungan mineral atau terdapatnya endapan bahan galian di bawah permukaannya.
- 2) Penggunaan lahan dalam kaitan dengan pemanfaatan sebagai ruang pembangunan, dimana tidak memanfaatkan potensi alamnya, tetapi lebih ditentukan oleh adanya hubungan-hubungan tata ruang dengan penggunaan penggunaan lain yang telah ada, di antaranya ketersediaan prasarana dan fasilitas umum lainnya.

Dalam memenuhi kebutuhan tanah akan pembangunan infrastruktur, maka pemerintah melakukan pembebasan tanah/pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah (Perpres No 36 Tahun 2005). Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara:

- 1) pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
- 2) pencabutan hak atas tanah

Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Perpres No 36 Tahun 2005).

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah (Perpres No 36 Tahun 2005).

Ganti rugi yang dimaksud dalam pelepasan tanah adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah (Perpres No 36 Tahun 2005). Bentuk ganti rugi dapat berupa:

- 1) uang; dan/atau
- 2) tanah pengganti; dan/atau
- 3) pemukiman kembali

Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak menghendaki bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat diberikan kompensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpres No 36 Tahun 2005). Prosedur hukum pengadaan tanah harus disertai dengan pelepasan/penyerahan hak dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain. Pelepasan hak itu sendiri bisa berupa jual beli, penyerahan, hibah atau pencabutan, namun yang berlaku demi kepentingan umum hanya berupa pelepasan hak dalam arti penyerahan dengan imbalan ganti rugi, dan pencabutan hak setelah musyawarah tidak menemukan sepakat (Mekanisari, 2009).

## **GAMBARAN UMUM BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT**

Bandara Internasional Jawa Barat terletak di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, sekitar 97 km dari Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat Indonesia. Ditempatkan strategis di sekitar daerah pembangunan Jawa Barat, aksesibilitas PT. BIJB dijamin dengan memiliki dua jalan raya dan kereta api yang menghubungkan Bandung, Kertajati, dan Cirebon; Cisumdawu Jalan Tol untuk menghubungkan Bandung dan Kertajati; Jalan tol Cikapali yang menghubungkan Kertajati dan Karawang Industrial Zone; dan juga memiliki hubungan langsung dengan Pelabuhan Cirebon.

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) merupakan realisasi pemerintahan Gubernur Jawa Barat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang terdapat dalam misi keempat yaitu Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Pembangunan BIJB ini tepatnya terdapat dalam strategi ke lima Bidang Perhubungan, yaitu melalui strategi mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman. Selain itu, pada Bab 8 RPJMD Provinsi Jawa Barat yaitu Indikasi Rencana Program Priotas yang Disertai Kebutuhan Dana, pembangunan BIJB disebutkan pada sub bab 8.1.16 pada nomor 2 yaitu Kebijakan pengembangan sistem transportasi udara yang dilaksanakan melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan sasaran terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat, antara lain melalui Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity (Jabar, 2013).

Dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandara Udara Internasional Jawa Barat, dijelaskan bahwa maksud dan tujuan pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati Aerocity adalah:

- 1) Mendorong pengembangan wilayah pembangunan Ciayumajakuning (Cirebon – Indramayu – Majalengka - Kuningan);
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional berbasis potensi Daerah;
- 3) Meningkatkan daya saing global Jawa Barat dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan investasi;
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi udara; dan

- 5) Meningkatkan investasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, dan perluasan lapangan kerja.

Pembangunan bandar udara dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan dokumen perencanaan induk yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan pembangunan tersebut terbagi atas:

- 1) Tahap Persiapan tahun 2015
- 2) Tahap I tahun 2015-2020
- 3) Tahap I-II tahun 2012-2025
- 4) Tahap III tahun 2025-2035
- 5) Tahap IV tahun 2035-2045

Tahap I akan difokuskan pada Mengembangkan Bandara, tahap I-II akan terkonsentrasi pada pembangunan Kertajati Aerocity, fase III akan pertumbuhan Kertajati sebagai aerotropolis, dan sebagai tahap akhir, Kertajati Aerocity akan bertindak sebagai enabler dari berkelanjutan ekonomi.

Pembangunan BIJB ini terbagi atas dua sisi, yaitu sisi udara yang dibiayai oleh APBN dan sisi darat yang dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat. Sampai dengan pertengahan Bulan Desember 2015, pembangunan BIJB ini baru dilakukan pada sisi udara yang dilakukan oleh Satker dari tahun 2012. Pembangunan sisi udara ini telah menyelesaikan *runway* sepanjang 2500 m dari total 3500 m, juga sedang menyelesaikan taxiway dan apron atau halaman parkir pesawat.

Sedangkan untuk sisi darat, baru akan dimulai pembangunan akhir Bulan Desember 2015 setelah pada awal Desember diumumkan pemenang tender untuk menjalankan proyek (Petikan wawancara dengan UMP BIJB, 2015). Namun untuk perencanaan pembangunan bandara itu sendiri sudah dimulai pada tahun 2002.

## **DAMPAK PEMBEBASAN LAHAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PADI MASYARAKAT DI SEKITAR KERTAJATI**

Sebagian besar masyarakat telah mengalokasikan uang ganti untung pembebasan lahan untuk membeli lahan pertanian di lokasi baru. Dari hasil uang ganti untung tersebut, masyarakat mampu membeli tanah yang lebih luas dari tanah yang dibebaskan. Pemerintah ketika membebaskan tanah di sekitar Kertajati menggunakan prinsip ganti untung. Ganti untung (dalam bentuk harga tanah per bata) yang diberikan oleh pemerintah masih lebih besar nilainya dibandingkan dengan harga tanah yang berlaku di pasar. Pemerintah pada tahun 2013 memberikan harga kepada masyarakat untuk tanah per bata adalah Rp 700.000 sampai dengan Rp 900.000, sedangkan tanah yang berlaku dipasaran saat itu adalah sekitar Rp 300.000 sampai dengan Rp 500.000 per bata. Harga tanah di wilayah yang terpencil juga jauh lebih murah, sehingga masyarakat menjadi dapat membeli tanah jauh lebih luas dari tanah yang dilepas kepada pemerintah (Petikan wawancara dengan tokoh masyarakat, 2016). Harga tanah yang berlaku di pasaran pada saat itu lebih rendah dibandingkan harga tanah yang telah diberikan oleh pemerintah membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli tanah yang lebih luas dari yang sebelumnya mereka miliki. Kondisi perubahan luas tanah milik masyarakat tersebut dapat dilihat dengan menggunakan Statistik Uji Beda Rata-rata. Hasil dari uji beda rata-rata luas lahan milik masyarakat dengan langkah sebagai berikut:

1. Jumlah responden diklasifikasikan antara yang hanya rumahnya saja yang terkena pembebasan dengan responden yang dibebaskan tanah. Responden yang hanya dibebaskan rumahnya saja sebesar 5 orang.
2. Didapatkan sampel sebanyak 94 orang yang lahannya terkena pembebasan.
3. Melakukan uji data menggunakan Alat Statistik Uji Beda Rata-Rata: *Paired-Sample T test* (Uji Sampel Berpasangan).

Tabel 1 Hasil Pengolahan Paired-Sample T Test

Variabel	N	Correlation	Mean	T-Statistik	Sig.
Luas tanah milik masyarakat sebelum pembebasan tanah - Luas tanah milik masyarakat sesudah pembebasan tanah	94	0.644	37.734	0.368	0.714

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Survei membuktikan dari hasil pengolahan data bahwa hingga saat penelitian ini dilakukan, ada perubahan luas tanah yang dimiliki oleh masyarakat sebelum dan sesudah pembebasan tanah. Luas tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang terkena pembebasan tanah pembangunan BIJB setelah pembebasan tanah lebih besar dari sebelum pembebasan tanah. Luas tanah yang meningkat diasumsikan akan memberikan perubahan pada produktivitas lahan padi. Produktivitas adalah kemampuan suatu faktor produksi, seperti luas tanah, untuk memperoleh hasil produksi per hektar (Aminuddin, 2009). Ketika suatu factor produksi tersebut meningkat, maka kemampuan untuk menghasilkan hasil produksi juga akan meningkat. Seperti halnya ketika luas lahan. Pertanian yang dimiliki oleh masyarakat meningkat, maka hasil produksi yang dihasilkan akan meningkat juga. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengolahan *Paired-Sample T Test*

Variabel	N	Correlation	Mean	T-Statistik	Sig.
Nilai produktivitas lahan pertanian sebelum pembebasan tanah - Nilai produktivitas lahan pertanian sesudah pembebasan tanah	94	.634	514990,426	0.437	0.663

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Hasil uji t Paired Samples Test ini mengindikasikan bahwa hingga penelitian ini dilakukan ada perubahan nilai produktivitas lahan padi milik masyarakat yang terkena pembebasan antara sebelum dan sesudah pembebasan tanah. Ganti untung yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membuat masyarakat dapat membeli tanah pertanian yang lebih luas dari sebelum pembebasan tanah. Ketersediaan sumber daya lahan, air dan iklim merupakan dasar utama untuk menghasilkan produksi pangan secara optimal (Taufik, 2012). Ketersediaan sumber daya yang luas dapat membuat perubahan tingkat produktivitas padi milik masyarakat yang terkena pembebasan tanah pembangunan BIJB di Kertajati.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan secara keseluruhan dalam bagian analisis ditemukan bahwa terdapat dampak positif pembebasan lahan masyarakat di Kertajati terhadap produktivitas lahan pertanian masyarakat Kertajati tersebut. Dampak positif tersebut ialah peningkatan produktivitas lahan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya uang ganti untung yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membuat masyarakat dapat membeli tanah pertanian yang lebih luas dari sebelum pembebasan tanah.

## BIBLIOGRAFI

Abdulsyani. 1994. *Sosiologi: Sistemika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Adhanari, M. A. 2005. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada Maharani Handicraft Di Kabupaten Bantul. Diakses melalui <http://lib.unnes.ac.id/> , pada tanggal 27 Januari 2016.
- Adisasmita, S. A. 2014. *Tatanan Bandar Udara Nasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustina, C. 2010. Panduan Tutorial dan Praktikum Mata Kuliah Survei Tanah dan Evaluasi Lahan. Malang: Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Diakses melalui [stela2010.files.wordpress.com](http://stela2010.files.wordpress.com), pada tanggal 5 Februari 2016.
- Aminuddin.(2009). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Produksi Padi Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi-Selatan. *Jurnal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3 No. 1 Mei 2009. Diakses melalui <http://jiae.ub.ac.id/>, pada tanggal 27 Januari 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka. (2015). Kecamatan Kertajati Dalam Angka Tahun 2015.
- Barat, D. P. (2014). *Perkembangan Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BJIB) Di Kertajati - Majalengka dan Jalan Tol Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat*. Diakses melalui <http://slideplayer.info/slide/2690883/>, pada tanggal 3 Januari 2016.
- BIJB, P. (n.d.). *Akses Menuju Bandara Kertajati Melalui Tol Cikapali dan Cisumdawu*. Retrieved Januari 16, 2016, from BIJB: <http://bijb.co.id/ID/akses-bandara/>
- BIJB, P. (n.d.). *Fasilitas Bandara*. Retrieved Januari 16, 2016, from BIJB: <http://bijb.co.id/ID/fasilitas-bandara/>
- Bintarto. (1977). *Buku Penuntun Geografi Sosial*. Yogyakarta: U.P Spring.
- Desa Kertasari. (2015). Proposal Penetapan Lokasi dan Rencana Pembangunan Pusat Pemerintahan Desa Kertasari.
- Earth, G. (n.d.). *Peta Udara Kecamatan Kertajati*. Retrieved Februari 19, 2016, from <https://www.google.co.id/maps>
- Gustiyan. (2004). *Analisis Pendapatan Usahatani untuk Produk Pertanian*. Jakarta: Salemba empat.
- Hanjani, D. A. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Karyawan Outsourcing PT. Perkebunan Nusantara II Unit Kebun Sawit Seberang. *Skripsi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara*. Diakses melalui [repository.usu.ac.id/](http://repository.usu.ac.id/), pada tanggal 30 Januari 2016.
- Haryono, D. (2008). Dampak Industrialisasi Pertanian Terhadap Kinerja Sektor Pertanian dan Kemiskinan Perdesaan: Model CGE Recursive Dynamic. *Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor*. Diakses melalui <http://www.damandiri.or.id/>, pada tanggal 6 Februari 2016.
- Idjudin, A. A. (2012). Peranan Konversi Lahan Dalam Pengelolaan Perkebunan. *Jurnal Sumberdaya Lahan* Vol. 5 No 2, Desember 2012 .
- Ihsan, F. (2005). *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Indah, N. F., Samsul Ma'arif. (2014). Pengaruh Keberadaan Bandara Internasional Kualanamu Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi dan Perubahan Fisik Kawasan Sekitarnya. *Teknik PWK; Vol 3 No. 1* . Diakses melalui [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id), pada tanggal 13 Desember 2015.

- Jabar, P. P. (2013). *RPJMD*. Retrieved April 24, 2015, from Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat: <http://jabarprov.go.id>
- Jayadinata, J. T. (1999). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Johara, J. T. (1992). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015 – 2019. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 2002 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Khaafidh, M. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tenaga Kerja Untuk Bekerja di Kegiatan Pertanian (Studi Kasus: Kabupaten Rembang). *Diponegoro Journal Of Economics Vol. 2 No 2*.
- Koentjaraningrat. (1994). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Laila Husin, D. W., Dwi Wulan Sari. 2011. Perilaku Ekonomi Rumah tangga Petani Karet di Prabumulih dalam Alokasi Tenaga Kerja, Produksi dan Konsumsi. *Laporan Penelitian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Sriwijaya*. Diakses melalui <http://eprints.unsri.ac.id/>, pada tanggal 28 Desember 2015.
- Mekanisari, N. 2009. Identifikasi Faktor Risiko Proses Pembebasan Tanah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Waktu Pada Proyek Banjir Kanal Timur DKI Jakarta. *Tesis Teknik Sipil Universitas Indonesia*. Diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/> pada tanggal 6 Februari 2016.
- Modul Statistika Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung 2013.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Munir, M. 2008. Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (kasus: Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah). Diakses melalui <http://repository.ipb.ac.id/>, pada tanggal 7 Februari 2016.
- Mustamin, S. H. 2013. Faktor-faktor Pengaruh Tingkat Pendidikan Anak Di Pemukiman Kumuh Kota Makassar. *Lentera Pendidikan, Vol.16 No 2*.
- Mustopa, Z., P. B. Santosa. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Demak. Diakses melalui <http://eprints.undip.ac.id/>, pada tanggal 21 Januari 2016.
- Ndawa, J. J. 2014. Dampak Alih Penggunaan Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Petani di Kota Batu (Studi Kasus Desa Oro-Oro Ombo Batu). *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya*. Diakses melalui [jimfeb.ub.ac.id](http://jimfeb.ub.ac.id), pada tanggal 5 Februari 2016.
- Oktafiani, A. P. 2012. Dampak Adanya Perumahan Joho Baru Terhadap Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003-2011. *Artikel Ilmiah Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta*. Diakses melalui [eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id), pada tanggal 7 Februari 2016.
- Oktama, R. Z. 2013. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Keluarga Nelayan di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan emalang Kabupaten Pemalang



Tahun 2013. *Skripsi Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*. Diakses melalui lib.unnes.ac.id, pada tanggal 29 Januari 2016.

Partadiredja, A. 1980. *Beberapa Masalah Dalam Produksi Bahan Makanan*. Jakarta: Prisma Tahun IX No 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 13 Tahun 2010 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah

Prabowo, H. 2011. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tenaga Kerja Desa untuk Bekerja di Kegiatan Non-Pertanian (Studi Kasus: Kabupaten Pekalongan). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*. Diakses melalui core.ac.uk/, pada tanggal 5 Januari 2016.

Puryantoro., Sulistyaningsih. 2013. Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Pendapatan Petani (Studi kasus: Desa Landangan Kecamatan Kaponan). Diakses melalui unars.ac.id, pada tanggal 5 Februari 2016.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2013. Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2013.

Rahmawati, M. L. 2010. Hubungan Antara Usia Dengan Prevalensi Dugaan Mati Mendadak. *Skripsi Kedokteran Universitas Sebelas Maret*. Diakses melalui core.ac.uk, pada tanggal 27 Januari 2016.

Rahmawati, S., B. Genjik., Rustiyarso 2013. Pengaruh Penghasilan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak. Diakses melalui download.portalgaruda.org, pada tanggal 3 Februari 2016.

Rianse, U. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Ritohardoyo. 2013. *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

RPJM Desa Bantarjati Tahun 2014-2020

RPJM Desa Kertajati Tahun 2015 – 2020

RPJM Desa Sukakarta Tahun 2014 – 2019

Soekanto, S. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekartawi. 1990. *Ilmu Usahatani*. Jakarta: UI Press.

Sudarsono, U. 2011. Karakteristik Geologi Teknik Tanah Residu Batuan Sedimen Kuarter Bawah Daerah Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. *Jurnal Geologi Indonesia, Vol 6 No 3, 2*.

Sudremi, Y. 2007. *Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiarto. 2008. Analisa Tingkat Kesejahteraan Petani Menurut Pola Pendapatan dan Pengeluaran di Perdesaan. *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian*.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. 2000. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukirno, S. 2002. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sumitro. 1998. *Pngantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta.
- Taufik, M. (2012). Analisis Produktivitas Padi Sawah Di Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Volume 8, Nomor 2, Desember 2012* .
- Thaief, I. 2014. Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 5 No 1, Mei 2014* .
- Trisnasari, D., A.F. Sebayang., R. Haryatiningsih. 2015. Rumah Tangga Petani dalam Ahli Fungsi Lahan Pertanian di Desa Bumi Wangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. *Prosiding Penelitian Sivitas Akademika Unisba* .Diakses melalui repository.unisba.ac.id/, pada tanggal 2 Februari 2016.
- Utomo, M. 1992. *Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan*. Lampung: Universitas Lampung. Wawancara dengan Aparat Desa Bantarjati: Bapak Suharto, sebagai Kasi Urusan Ekonomi Pembangunan Desa Bantarjati. Tanggal 3 Januari 2016.
- Wawancara dengan Aparat Desa Kertajati: Bapak Ano Juhaendi, sebagai Sekretaris Desa Kertajati. Tanggal 4 Januari 2016.
- Wawancara dengan Aparat Desa Kertasari: Bapak Drs. Rohendi, sebagai Sekertaris Desa Kertasari. Tanggal 3 Januari 2016.
- Wawancara dengan Aparat Desa Sukakerta: Bapak Charyadie, sebagai Sekertaris Desa Sukakerta. Tanggal 4 Januari 2016.
- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat: Ibu Ijah. Tanggal 18 Februari 2016.
- Wawacara dengan Tokoh Masyarakat: Bapak Asep. Tanggal 18 Februari 2016.
- Wawancara dengan Unit Management Project PT. BIJB: Bapak Zaki Zaenudin, ST, sebagai Staf Humas UMP PT. BIJB. Tanggal 17 Desember 2015.